



JURNAL ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA VOL. 12 No. 1, Th. 2021 (85-96)

(Print ISSN 2613-9561 Online ISSN 2686-245X)

Tersedia online di https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap

EVALUASI PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN MODEL CIPP (STUDI KASUS PADA SMK NEGERI SE-KOTA DENPASAR)

Diterima: 15 Juli 2021; Direvisi: 05 Agustus 2021; Disetujui: 26 Agustus 2021

Permalink/DOI: https://doi.org/10.23887/jurnal_ap.v12i1.479

Y. Sutrisnawati¹, I.G.K.A. Sunu², K.R. Dantes³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.

e-mail: yantisutrisnawati.2@undiksha.ac.id¹, arya.sunu@undiksha.ac.id², rihendra.dantes@undiksha.ac.id³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi hasil evaluasi terpisah dan bersama dalam *context*, *input*, *process*, *product* dan berbagai kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penggunaan BOSDA Tahun Anggaran 2020 pada SMK Negeri se-Kota Denpasar. Penelitian evaluasi program dengan Model CIPP menjadi dasar penelitian ini. Ada sebanyak 26 orang yang menjadi populasi sekaligus keseluruhannya dijadikan sampel penelitian dengan mempergunakan teknik sampel jenuh. Data *context*, *input*, *process*, *product* berhasil terkumpul menggunakan kuesioner skala Likert 1-5. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Dalam hal penentuan efektivitas pelaksanaan penggunaan BOSDA ini, skor mentah data ditransformasi menjadi Z-skor kemudian ke T-Skor dan diverifikasi ke dalam Kuadran Glickman. Hasil dalam penelitian ini yaitu: 1) Efektifitas pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari *context* diperoleh hasil negatif (-), 2) Efektifitas pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari *input* diperoleh hasil negatif (-), 3) Efektifitas pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari *process* diperoleh hasil efektif (+), 4) Efektifitas pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari *product* diperoleh hasil efektif (+), 5) Secara bersama, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari variabel CIPP, diperoleh hasil kurang efektif (- - + +), dan 6). Beberapa tantangan yang terbukti dihadapi pada saat pengoperasian BOSDA adalah terdapat ketidaksesuaian penggunaan BOSDA dengan kebijakan pemerintah, kurangnya kesiapan dari pengelola BOSDA, kurang kejelasan dari landasan hukum penggunaan BOSDA.

Kata kunci; BOSDA; Studi Evaluasi; CIPP.

Abstract

The aim of the study was to investigate the evaluation results separately or together on context, input, process, product and constraints that occur in the implementation of the use of BOSDA Fiscal Year 2020 at smk negeri in Denpasar. The present research used a program evaluation research with CIPP model. There were 26 people and the whole acted as population and used as a research sample using saturated sample techniques. Data context, input, process, product collected by questionnaire using Likert scale 1-5. In this study using descriptive quantitative analysis method. To determine the effectiveness of implementing bosda's usage, the raw score is transformed into Z-score then into T-Score then verified into Glickman Quadrant. The results in this study are: 1) Effectiveness of bosda usage implementation reviewed from context obtained negative results (-), 2) Effectiveness of bosda use reviewed from inputs obtained negative results (-), 3) Effectiveness of bosda usage implementation reviewed from the process obtained effective results (+), 4) Effectiveness of implementation of bosda use reviewed from product obtained effective results (+), 5) Evaluation

results together against the implementation of bosda use reviewed from i context, input, process, product obtained less effective results (- - +), and 6) Obstacles faced in the use of BOSDA is there is a discrepancy in the use of BOSDA with government policy, lack of readiness from bosda managers, lack of clarity from the legal basis of the use of BOSDA.

Keywords; BOSDA; Evaluation Studies; CIPP.

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdefinisi sebagai sebuah jenjang pendidikan yang dilengkapi dengan program keahlian, yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga siap pakai di dalam konteks besar Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Tahun 2020, Provinsi Bali memiliki 51 SMK Negeri yang tersebar di delapan kabupaten dan 1 kota madya. Masing-masing SMK memiliki program keahlian yang bervariasi. Hal tersebut akan berpengaruh pada kebutuhan baik tenaga pendidik maupun biaya disetiap satuan pendidikan.

Dukungan pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan mutu dari lulusan SMK, telah memprogramkan baik pada visi misinya Nangun Sat Kerthi Loka Bali (dikutip dalam <https://disdikpora.baliprov.go.id/nangun-sat-kerthi-loka-bali/>)

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. *"Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali berserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala niskala menuju kehidupan krama dan gumi sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 juni 1945.*

Dalam agenda prioritas pemerintah Provinsi Bali program bidang pendidikan disebutkan sebagai berikut: 1) Persiapan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, 2) Pengembangan pendidikan SMK 4 tahun (setara diploma I), 3) Pengembangan pendidikan SMK kewirausahaan, 4) Menyiapkan program kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri. Dalam perwujudannya, pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pendidikan yang mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan kementerian.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan sebagai berikut : 1) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat", 2) Pasal 46 Ayat (2) menyatakan " Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, 3) Pasal 49 ayat (1) menyatakan "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 21 ayat (2) menyebutkan: Pendanaan Biaya Nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah. Begitu juga pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan: Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya non personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, 3) Pasal 30 ayat (1), "satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan salah satunya yang mana berfokus tentang diaturnya tipe-tipe pelayanan dasar pada SPM pendidikan pendidikan daerah kabupaten/kota. SPM tersebut terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kemudian, jenis pendidikan dasar pada SPM pendidikan daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan khusus. Disebutkan pada pasal 16 ayat (1), bahwasanya bentuk biaya pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibebankan kepada pemerintah daerah untuk: Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Tahun 2017 SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bali yang tahun sebelumnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten/Kota Madya. Mengingat kemampuan APBD di tiap kabupaten berbeda-beda, sehingga ada sekolah yang siswanya bebas biaya pendidikan dan ada juga yang masih membayar biaya pendidikan. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan di semua satuan pendidikan dengan menganggarkan dana APBD bagi pendidikan tingkat menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SLB).

Terdapat pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah tertuang beberapa hal yang mendasari satuan pendidikan dalam penerimaan serta pengelolaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Adapun maksud, tujuan dan manfaat Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam Pasal sebagai berikut: 1) Pasal 2, menyebutkan Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah ditujukan sebagai pemberian acuan dan pedoman bagi satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pendamping. 2) Pasal 3, Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah memiliki beberapa tujuan, yaitu: a. Perwujudan pembiayaan pendidikan yang terjangkau pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi; b. Mewujudkan Standar Pelayanan Minimal yang akuntabel, transparan, merata dan berkeadilan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi; dan c. Mewujudkan pemenuhan SNP pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di provinsi. 3) Pasal 4, manfaat dari pemberian Fasilitasi Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk: a. Membantu kebutuhan biaya operasional sekolah dan biaya penunjang proses pembelajaran; b. Mengurangi angka putus sekolah pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi; c. Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi; dan d. Memperlancar pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Provinsi.

APBD Provinsi Bali selain dalam bentuk Dana Fasilitas Bantuan Operasional Sekolah Daerah, pada SMK Negeri juga dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan UKK (Uji Kompetensi dan Keahlian). Masing-masing mendapatkan anggaran yang berbeda sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan serta anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga kontrak yang memiliki SK. Dalam pelaksanaan APBD dari awal tahun 2017 sampai saat ini, belum semua sekolah mampu merealisasikan anggaran sepenuhnya. Harapan pemerintah untuk pemerataan pendidikan belum tercapai optimal. Keadaan ini berakar dari beberapa faktor yaitu, kurangnya pengertian dan pemahaman dalam menyusun RKAS, Aliran Kas, proses pengadaan barang, SPJ, serta pelaporan keuangan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berupaya untuk memfasilitasi informasi dan memberikan pelayanan kepada sekolah mengingat rentang kendali yang cukup jauh. Tahun 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melalui BPP Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan melaksanakan proses verifikasi SPJ secara daring. Ini merupakan salah satu upaya untuk meringankan pihak sekolah dalam membawa dokumen SPJ berkali-kali karena masih adanya kesalahan-kesalahan dalam penyusunan SPJ. Namun masih belum semua dapat terorganisir dengan baik, dikarenakan tenaga untuk memverifikasi terbatas.

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar), 2) Mengevaluasi Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) dilihat dari aspek *context, input, process* dan *product*,

3) Mengidentifikasi hambatan dan solusi Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar).

METODE

Penelitian yang penulis laksanakan berbentuk penelitian evaluasi dengan orientasi manajemen. Orientasi manajemen adalah gambaran yang berfokus pada prosedur dan proses dari sebuah pelaksanaan di lapangan. Efektifitas beberapa variabel dalam model CIPP (*context, input, process, product*) juga diinvestigasi dengan memfokuskan pada target sasaran yang mana adalah ukuran efektifitas program. Keefektifitasan program dapat kita ketahui dengan melihat terpenuhi atau tidaknya target, atau bahkan mungkin menunjukkan angka terlampaui. Jika statistik tidak menunjukkan keadaan tersebut, maka program dapat dikatakan belum efektif.

Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai nilai positif, dan dengan melihat keuntungan program yang terimplementasi dengan teknik khusus. Evaluasi program dalam konteks ini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk menemukan seberapa efektif pelaksanaan penggunaan BOSDA Provinsi Bali pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Bali khususnya di kota Denpasar yang diterapkan di SMK Negeri Kota Denpasar dan berbagai kendala yang dihadapi, agar dapat dicari solusinya.

Angket disebar untuk mengambil data mengenai efektifitas pelaksanaan penggunaan APBD Provinsi Bali pada SMK Negeri Provinsi Bali khususnya SMK Negeri di Kota Denpasar bersumber komponen CIPP dengan menggunakan angket sebagai instrumen. Dokumentasi juga diimplementasikan yang adalah dokumentasi resmi internal di SMK Negeri di Kota Denpasar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga provinsi Bali, BPKAD Provinsi Bali yang adalah data dan dokumen lain sebagai pendukung.

Empat variabel terlibat di dalam penelitian ini. Adapun variabel penelitian adalah *context, input, proses, dan product*. Variabel *context* dalam konteks ini adalah: relevansi program dengan kebutuhan, Visi, Misi dan Tujuan program, regulasi atau aturan dalam pelaksanaan program. variabel *input* meliputi: struktur pelaksana kegiatan APBD, kesiapan kemampuan pihak sekolah, kesiapan kemampuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, kesiapan kemampuan BPKAD Provinsi Bali. Variabel proses meliputi: Sosialisasi pelaksanaan penggunaan APBD APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 kepada pihak sekolah, pengelolaan dana APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 proses pencairan SPJ yang diajukan pihak sekolah ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dan BPKAD Provinsi Bali. Sedangkan variabel *product* berupa realisasi dari penggunaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 dan kualitas dari pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dan BPKAD Provinsi Bali kepada pihak sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan APBD Provinsi Bali.

Pengumpulan data penelitian menggunakan dua jenis instrument yaitu angket/kuesioner dan dokumentasi/observasi. Instrumen pengukur variabel tentang penelitian evaluasi pelaksanaan penggunaan APBD Provinsi Bali pada SMK ini dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kuisisioner model skala Likert digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2013) dan Riduan (2011) dalam Oktavia (2015) menyatakan bahwa skala Likert adalah skala yang akurat untuk mengukur persepsi, pendapat, dan sikap manusia tentang sebuah fenomena tertentu.

Dalam pemenuhan validasi isi (*content validity*) dilaksanakan *expert judgment* atau uji ahli. Validasi instrumen meliputi validasi variabel *context, input, process* dan *product*. Analisis validitas berkiblat pada formula analisis validasi Robert Gregory. Data yang telah terkumpul diproses melalui proses editing serta tabulasi. Jawaban responden kemudian diberikan skor dan diperoleh data interval, meliputi, data variabel *context, input, process, product*. Terprediksi bahwa karakteristik data akan berbeda-beda. Hal ini menyebabkan keseluruhan data dicarikan rerata (mean) dan standar deviasi (SD) yang mana kemudian dianalisis dengan cara mengubah semua data dengan rumus: T-score. T-score yang mana

menggunakan mean = 50 dan standar deviasi = 10. Skala T- dicari dengan mengalikan nilai Z-score dengan 10, serta ditambah 50.

Dalam menemukan T-score masing-masing angka Z dikalikan SD, serta ditambah mean. Pengubahan T-score ke arah + dan – digunakan aturan: T-skor 50 = + (plus). T-skor < 50 = - (minus). Kemudian konversi dari skor CIPP ke kuadran Glickman dilaksanakan. Setelah data terkumpul dan terolah, analisis deskriptif menggunakan dibantu menggunakan program Microsof Exel dijalankan. Analisis data pada setiap variabel terarah pada aplikasi kurva normal. Data yang berada di atas atau di sebelah kanan daerah penerimaan diberi tanda positif (+), sebaliknya data yang berada di sebelah kiri atau di bawah daerah penerimaan diberi tanda negative (-). Kualitas skor dari masing-masing variabel kemudian dihitung menggunakan T-skor. Jika $T > M$ (mean) adalah positif (+), dan skor $T < M$ (mean) adalah negative (-). Hasil final tiap variabel dihitung dengan menjumlahkan skor positif (+) dan skor negative (-). Jika jumlah skor positif lebih banyak atau sama dengan jumlah skor negatif, maka, hasil final menjadi positif ($\sum \text{skor} + > \sum \text{skor} - = +$), begitu pula keadaan sebaliknya di mana saat jumlah skor positif lebih kecil dari jumlah skor negatif maka hasil akhirnya adalah negative ($\sum \text{skor} + (\sum \text{skor} - = -)$).

Dalam hal penentuan efektifitas pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) dilakukanlah sebuah analisis terhadap variabel CIPP yang mana melalui analisis kuadrat model “Glickman” (1981) yang terbagi dalam empat kuadran. Jika hasil menunjukkan hasil dari semua analisis positif (+) berada pada kuadrat I, maka, artinya “sangat efektif”, sebaliknya jika hasil menunjukkan hasil keseluruhan negatif (-) berada pada kuadran IV, maka, berarti “sangat tidak efektif”. Apabila hasil analisis dari tiga variabel positif, maka berada pada kuadran II, berarti “efektif”. Jika hasil dari analisis dua atau satu variabel menunjuk pada hasil positif, maka, berada pada kuadran III, berarti “tidak efektif”.

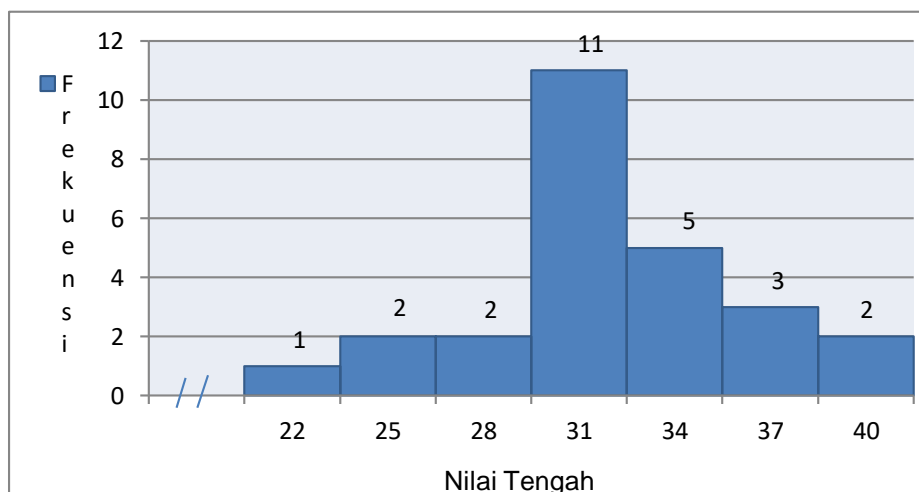
HASIL DAN PEMBAHASAN

Data mengenai variabel *context* yang mana telah diperoleh dari hasil ukur terhadap responden memberikan hasil nilai rata-rata sebesar 32,31, median 32, modus 32, standar deviasi 4,46, varians 19,9, skor minimum 21, skor maksimum 40. Rata-rata variabel *context* adalah 32,31. Hasil disusun menggunakan tabel distribusi frekuensi di bawah.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Skor Variabel *Context*

No.	Kelas Interval			Nilai Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)
1	21	-	23	22	1	3.85
2	24	-	26	25	2	7.69
3	27	-	29	28	2	7.69
4	30	-	32	31	11	42.31
5	33	-	35	34	5	19.23
6	36	-	38	37	3	11.54
7	39	-	41	40	2	7.69
Jumlah					26	100.00

Dalam hal memudahkan pembacaan tabel, berikut disajikan grafik histogram distribusi frekuensi variabel *Context*.



Gambar 1. Histogram Variabel Context

Menilik perhitungan, kemudian bisa dibuat tabel konversi kategori yang tertera seperti di bawah:

Tabel 2. Kategori Data Variabel Context

No	Kriteria	Klasifikasi
1	$53.80 \leq \bar{X}$	Sangat baik
2	$21.49 \leq \bar{X} < 53.80$	Baik
3	$-10.83 \leq \bar{X} < 21.49$	Sedang
4	$-43.14 \leq \bar{X} < 10.83$	Kurang baik
5	$\bar{X} < -43.14$	Sangat kurang baik

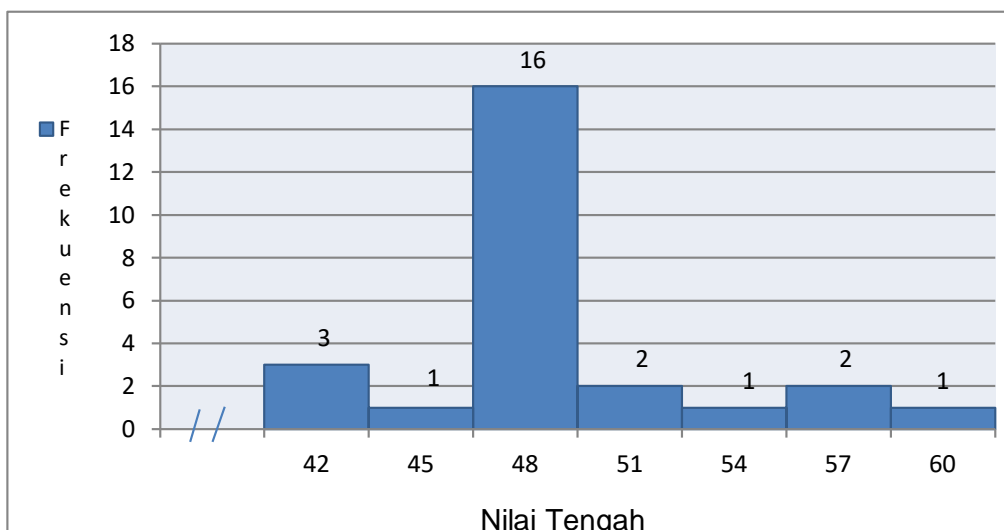
Dilihat dari Tabel 2. Kategori data variabel *context* menunjukkan kategori Baik yang mana berada pada rentang $21.49 \leq \bar{X} < 53.80$.

Variabel *input* yang mana didapatkan dari hasil pengukuran terhadap responden memperlihatkan nilai rata-rata sebesar 48,85, median 48, modus 48, standar deviasi 4.25, varians 18.05, skor minimum 41, skor maksimum 60. Setelah itu, hasil disusun dalam Tabel 3 distribusi frekuensi skor variabel Input seperti di bawah:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Input

No.	Kelas Interval		Nilai Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)
1	41	- 43	42	3	11.54
2	44	- 46	45	1	3.85
3	47	- 49	48	16	61.54
4	50	- 52	51	2	7.69
5	53	- 55	54	1	3.85
6	56	- 58	57	2	7.69
7	59	- 61	60	1	3.85
Jumlah				26	100.00

Dalam mempermudah untuk membaca tabel, kemudian disajikan grafik histogram distribusi frekuensi variabel Input.



Gambar 2. Histogram Variabel Input

Sesuai dengan perhitungan, dibuatkan tabel konversi kategori sebagai berikut:

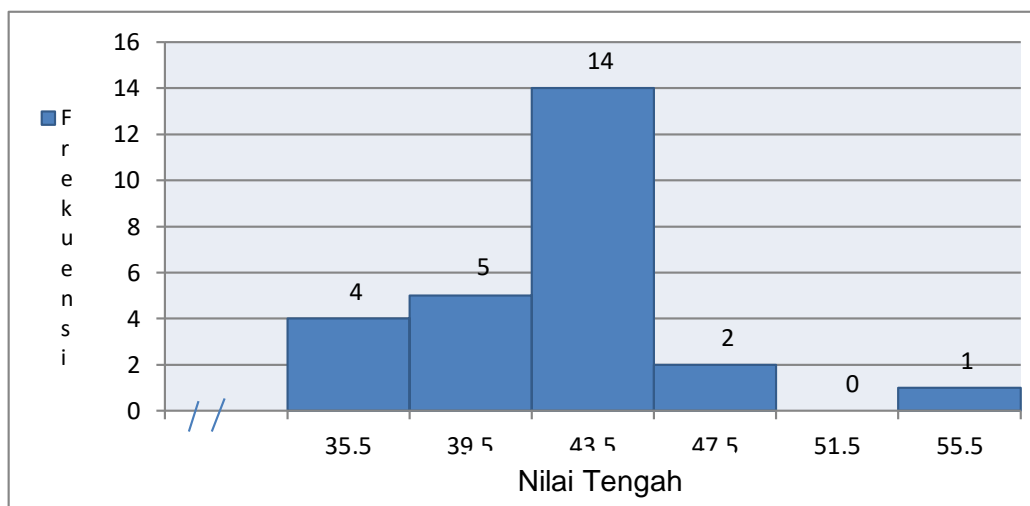
No	Kriteria	Klasifikasi
1	$81.25 \leq \bar{X}$	Sangat baik
2	$32.43 \leq \bar{X} < 81.28$	Baik
3	$-16.43 \leq \bar{X} < 32.43$	Sedang
4	$65.28 \leq \bar{X} < -16.43$	Kurang baik
5	$\bar{X} < -65.28$	Sangat kurang baik

Rata-rata variabel variabel input menunjukkan angka 48.85. Sesuai dengan tabel kategori, ditunjukkan bahwa variabel input berada pada kategori Sangat Baik, karena berada pada rentang $32.43 \leq \bar{X} < 81.28$.

Data dari variabel *process* yang mana diperoleh dari hasil pengukuran terhadap responden menunjukkan pada angka nilai rata-rata 42,38, median 44, modus 44 standar deviasi 4.8, varians 22.97, skor minimum 34, skor maksimal 55. Hasil tersebut kemudian disusun dalam tabel distribusi frekuensi.

No.	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)
1	34 - 37	35.5	4	15.38
2	38 - 41	39.5	5	19.23
3	42 - 45	43.5	14	53.85
4	46 - 49	47.5	2	7.69
5	50 - 53	51.5	0	0.00
6	54 - 57	55.5	1	3.85
Jumlah			26	100.00

Untuk memudahkan dalam pembacaan tabel. Berikut disajikan grafik histogram distribusi frekuensi variabel, yaitu:



Gambar 3. Histogram Variabel Proses

Sesuai dengan perhitungan, dibuatkan tabel konversi kategorinya yang tertera pada tabel berikut:

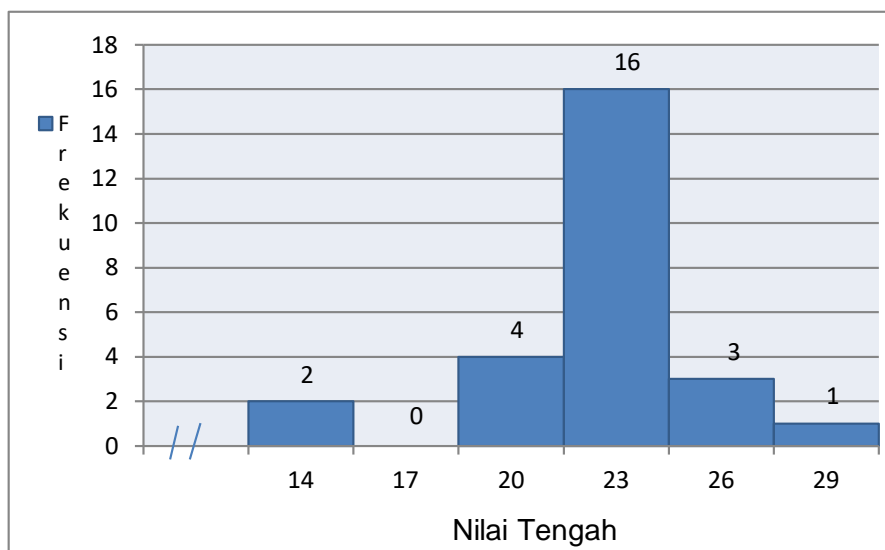
No	Kriteria	Klasifikasi
1	$70.90 \leq \bar{X}$	Sangat baik
2	$28.52 \leq \bar{X} < 70.90$	Baik
3	$-13.86 \leq \bar{X} < 28.52$	Sedang
4	$-56.24 \leq \bar{X} < -13.86$	Kurang baik
5	$\bar{X} < -56.24$	Sangat kurang baik

Rata-rata dari variabel *process* menunjukkan angka 42,38. Menurut tabel kategori, variabel *process* menunjukkan kategori Sangat Baik, karena berada pada rentang $28.52 \leq \bar{X} < 70.90$.

Data variabel produk menunjukkan nilai rata-rata sebesar 22.73, median 24, modus 24, standar deviasi 3.3, varians 10.84, skor minimum 13, skor maksimum 30. Kemudian, hasil disusun dalam tabel distribusi frekuensi sebagaimana yang terlihat di bawah ini:

No.	Kelas Interval			Nilai Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)
1	13	-	15	14	2	7.69
2	16	-	18	17	0	0.00
3	19	-	21	20	4	15.38
4	22	-	24	23	16	61.54
5	25	-	27	26	3	11.54
6	28	-	30	29	1	3.85
Jumlah					26	100.00

Untuk mempermudah pembacaan tabel, berikut tersaji data berupa grafik histogram distribusi frekuensi variabel:



Gambar 4. Histogram Variabel Produk

Sesuai dengan perhitungan, dibuatkanlah tabel konversi kategori, sebagai berikut:

Tabel 8. Kategori Data Variabel Produk

No	Kriteria	Klasifikasi
1	$38.10 \leq \bar{X}$	Sangat baik
2	$15.37 \leq \bar{X} < 38.10$	Baik
3	$-7.37 \leq \bar{X} < 15.37$	Sedang
4	$30,10 \leq \bar{X} < -7.37$	Kurang baik
5	$\bar{X} < -30.10$	Sangat kurang baik

Rata-rata dari variabel *product* menunjukkan angka 22.73. Sesuai dengan tabel kategori, maka variabel *product* menunjukkan status kategori Baik, karena berada pada rentang $15.37 \leq \bar{X} < 38.10$.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar), ditemukan bahwa efektivitas pelaksanaan penggunaan Bantuan Operasional Daerah ini tergolong kurang efektif (-+++). Ditilik dari setiap variabel dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penggunaan Bantuan Operasional Daerah Provinsi Bali, menunjukkan sebuah temuan di mana variabel *context* menunjukkan kategori tidak efektif (-), variabel *input* tidak efektif (-), variabel *process* efektif (+), dan variabel *product* efektif (+).

Pada variabel *context*, tidak efektifnya pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar). Ini dikarenakan beberapa faktor. Berdasarkan butir instrument yang sudah disebar dari 8 pernyataan yang diberikan kepada responden 5 pernyataan direspon negatif dan 3 pernyataan direspon positif. Pernyataan yang yang mendapatkan respon positif diantaranya: Penggunaan Bantuan Operasional Daerah memiliki misi yang jelas, Pengelola Bantuan Operasional Daerah memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya, Pengelola Bantuan Operasional Daerah merupakan tenaga ahli yang berkompeten.

Sedangkan pernyataan yang dipandang perlu mendapat penekanan dan perhatian bagi instansi terkait diantaranya: kesesuaian penggunaan Bantuan Operasional Daerah dengan kebijakan Pemerintah, kejelasan dari landasan hukum Penggunaan Bantuan Operasional Daerah, kesesuaian penggunaan Bantuan Operasional Daerah dengan landasan hukum yang berlaku, kejelasan dari visi penggunaan Bantuan Operasional Daerah, kejelasan tujuan dari penggunaan Bantuan Operasional Daerah.

Variabel *input* dalam penelitian ini tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar). Hal ini terlihat dari pernyataan *input* yang mana menunjukkan hasil negatif (-) cukup banyak yakni dari total 12 pernyataan yang diberikan kepada responden, sebanyak 9 pernyataan mendapatkan respon negatif dan 3 positif. Indikator evaluasi yang mendapatkan respon positif dari responden adalah kejelasan dari struktur organisasi dari Bantuan Operasional Daerah, struktur Organisasi Bantuan Operasional Daerah yang sudah di sosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan, dan kesiapan pengelola Bantuan Operasional Daerah dalam pemanfaatan anggaran.

Menurut hasil yang didapatkan, indikator evaluasi yang harus mendapatkan perhatian mengkhhusus akibat dari respon negatif responden adalah kurangnya kesiapan dari organisasi pengelola Bantuan Operasional Daerah dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pengelola Bantuan Operasional Daerah di persekolahan dalam menggunakan anggaran, kurangnya ketersediaan dari kemampuan Disdikpora Provinsi Bali, kurangnya sumberdaya yang berkompeten yang dimiliki oleh Disdikpora Provinsi Bali dalam pengelolaan Bantuan Operasional Daerah. Kurangnya kesiapan dari BPKAD Provinsi Bali, kurangnya fasilitas dalam penggunaan Bantuan Operasional Daerah, kurangnya pedoman penggunaan anggaran Bantuan Operasional Daerah.

Variabel *process* dalam penelitian ini secara umum mendukung efektivitas pelaksanaan penggunaan APBD Provinsi Bali. Hal ini dibuktikan dari respon yang diberikan oleh responden yang secara keseluruhan merespon secara positif. Penggunaan BOSDA sudah disosialisasikan dengan baik, tenaga kependidikan sudah memahami cara pemanfaatan penggunaan Bantuan Operasional Daerah dengan baik, langkah-langkah penggunaan Bantuan Operasional Daerah sangat mudah, Penggunaan Bantuan Operasional Daerah dikategorikan benar-benar mempermudah dan pengelola sekolah. Di mana, 1) tenaga kependidikan dan pengelola sekolah terfasilitasi berupa pelatihan dalam penggunaan BOSDA. Sistem penggunaan BOSDA tergolong gampang diimplementasikan; 2) Waktu pengoperasian BOSDA tidak terlalu lama; 3) Respon dari penggunaan BOSDA sangat baik, berujung pada proses administrasi yang dapat dipercepat; 4) Penggunaan BOSDA sangat mudah sehingga nyaman digunakan; 5) Kenyamanan dalam penggunaan BOSDA sangat baik; serta 6) penggunaan BOSDA yang tidak berbelit-belit.

Secara umum, variabel *product* dalam penelitian ini tergolong efektif dalam langkah mendukung efektivitas pelaksanaan penggunaan APBD Provinsi Bali. Hasil ini terlihat dari pernyataan dari variabel *product* yang mendapatkan hasil positif (+). Evaluasi variabel produk membantu dalam mengambil keputusan yang digunakan dalam peninjauan kembali sebuah rencana. Menurut hasil penelitian, dimensi yang ditetapkan sebagai acuan keberhasilan efektivitas pelaksanaan penggunaan APBD Provinsi Bali adalah kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pengguna yang mana dalam konteks tersebut adalah sekolah-sekolah terutama SMK di Kota Denpasar. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, terlihat bahwa keberlangsungan dari penggunaan Bantuan Operasional Daerah sangat diharapkan bagi pihak pengguna/sekolah, hasil ini menandakan kualitas layanan yang diberikan sudah baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang terjadi pada saat pelayanan. Akan tetapi, permasalahan ini bisa teratasi dengan baik, sehingga melahirkan kepuasan bagi para pengguna layanan.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) diantaranya: Pada variabel *context*: 1) Masih terdapat ketidaksesuaian penggunaan Bantuan Operasional Daerah dengan kebijakan Pemerintah, 2) Kejelasan dari landasan Hukum Penggunaan Bantuan Operasional Daerah, 3) Ketidak kesesuaian penggunaan Bantuan Operasional Daerah dengan landasan hukum yang berlaku, 4) Kejelasan dari visi penggunaan Bantuan Operasional Daerah, 5) Kejelasan tujuan dari penggunaan Bantuan Operasional Daerah. Pada variabel *input*: 1) Kurangnya kesiapan dari organisasi pengelola Bantuan Operasional Daerah dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pengelola Bantuan Operasional Daerah di persekolahan dalam

menggunakan anggaran, 2) Kurangnya ketersiapan dari kemampuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, 3) Kurangnya sumberdaya yang berkompeten yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam pengelolaan Bantuan Operasional Daerah, 4) Kurangnya kesiapan dari BPKAD Provinsi Bali, 5) Kurangnya fasilitas dalam penggunaan Bantuan Operasional Daerah, 6) Kurangnya pedoman penggunaan anggaran Bantuan Operasional Daerah. Pada variabel *product*: 1) Penggunaan BOSDA kurang dapat diandalkan untuk tenaga kependidikan dan pengelola sekolah, 2) Penggunaan Bantuan Operasional Daerah tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar pembiayaan sekolah, sehingga masih dipandang perlu adanya bantuan pembiayaan yang lain untuk menunjang sarana prasarana belajar pada sekolah khususnya SMK.

Berbagai kendala yang telah dipaparkan tersebut dapat di atasi dengan dilaksanakannya beragam kegiatan sebagai berikut: 1) Pendekatan pelatihan secara mandiri terkait penggunaan Bantuan Operasional Daerah bagi pengelola dan tenaga kependidikan, 2) Struktur pengelola perlu disebarluaskan dalam web atau berikan *contact* narahubung apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan Bantuan Operasional Daerah, 3) Memperjelas dan menekankan kembali visi dari Bantuan Operasional Daerah itu sendiri kepada setiap pengelola sehingga tujuan daripada pelaksanaan penggunaan APBD Provinsi tidak jauh menyimpang, 4) Pada Bulan Maret 2020, adanya rasionalisasi Dana APBD Provinsi Bali tahun Anggaran 2020 akibat dari pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan sekolah tidak sepenuhnya dapat terlaksana seperti kegiatan UKK, kegiatan Ujian Nasional tahun pelajaran 2019/2020 yang mana seluruh anggaran di fokuskan pada penanganan covid.

Sesuai dengan pembahasan hasil dan simpulan, ditemukan bahwa efektivitas pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) terletak pada kuadran III (ketiga) atau tergolong kurang efektif. Mengacu pada hal tersebut, temuan studi evaluatif ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lembaga terkait. Oleh karena itu, agar efektivitas pelaksanaan pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) efektif, maka variabel *context*, *input*, *process* dan *product* harus diperhatikan untuk memperbaiki pelaksanaan penggunaan APBD Provinsi Bali Tahun 2021 dapat ditingkatkan berdasarkan temuan dari penelitian ini.

Implikasi praktis bisa dikembangkan dari hasil studi evaluatif ini yang tidak terbatas pada efektivitas pelaksanaan pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) semata, akan tetapi dapat diterapkan pada penggunaan APBD di Kabupaten lain atau pada tingkat SMA dan SLB.

SIMPULAN

Dapat dirangkum hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Efektifitas pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari *context* diperoleh hasil negatif (-), 2) Efektifitas pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari *input* diperoleh hasil negatif (-), 3) Efektifitas pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari *process* diperoleh hasil efektif (+), 4) Efektifitas pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari *product* diperoleh hasil efektif (+), 5). Secara bersama, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan BOSDA ditinjau dari variabel CIPP, diperoleh hasil kurang efektif (- - + +), dan 6). Beberapa tantangan yang terbukti dihadapi pada saat pengoperasian BOSDA adalah terdapat ketidaksesuaian penggunaan BOSDA dengan kebijakan pemerintah, kurangnya kesiapan dari pengelola BOSDA, kurang kejelasan dari landasan hukum penggunaan BOSDA. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan: pelaksanaan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) jika input dan proses dapat berjalan baik, maka, output yang baik akan menjadi implikasinya. Hal ini dikarenakan APBD berfungsi sebagai sistem. Hal ini menyebabkan input, proses, output menjad sebuah satu kesatuan yang terintegrasi. Melakukan perubahan pada sebuah

komponen, tentu akan menghasilkan perubahan pada komponen yang lain. Tujuan dari diadakannya sebuah evaluasi seperti yang ada di penelitian ini adalah dapat menentukan kebijakan dengan pertimbangan nilai-nilai positif, keuntungan program yang dilakukan dengan teknik tertentu. Yang dimaksud dengan evaluasi program dalam konteks penelitian ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menemukan seberapa efektif pelaksanaan pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus pada SMK Negeri se-Kota Denpasar) sehingga anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi Bali data terealisasi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustanico Dwi Muryadi. 2017. "Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi". Jurnal Ilmiah, Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Campuran. Bnadung: Reflika Aditama.
- Fauziyyah, Nur Azizah, dkk. 2018. "Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung". Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019, tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2019, tentang Fasilitas Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- Petunjuk Teknis tahun 2019, tentang Penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Bagi SKPD dan BLUD Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.
- Priyono, Suci. 2019. "Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 1 Kebumen". Tesis, Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta.
- Sitompul, Tiurma Rosmauli. 2018. "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang". Tesis, Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sunardi. 2017. "Efektivitas Penggunaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di SMK Kristen Immanuel Kota Pontianak Program Keahlian Akuntansi Dengan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) (Jurnal MAKSI UNTAN) 2(4)
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.